



Peranan PKK terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Perempuan Di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso

Imanuel N. Tadanugi^{a,1*}

^a Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Sintuwu Maroso, Poso, Sulawesi Tengah, 94619

¹ nueltadanugi@gmail.com*

*korespondensi penulis

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 12-07-2020

Disetujui: 28-09-2020

Kata Kunci:

Peran PKK, Sosial Ekonomi Perempuan, Pembangunan Desa

ABSTRAK

Abstrak: Peranan PKK Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Perempuan Di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan PKK Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Perempuan Di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan jumlah informan 12 orang, hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan PKK dalam melakukan koordinasi kepada pemerintah dan masyarakat desa Bo'e dapat berjalan dengan baik, kemudian peranan PKK dalam melakukan pembinaan kepada kaum perempuan /Ibu rumah tangga Desa Bo'e juga dapat terlaksana dengan baik akan tetapi peranan PKK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya kaum perempuan terhadap kondisi social ekonomi Desa Bo'e, belum dapat terlaksana dengan baik, selanjutnya peranan PKK dalam mengajak masyarakat untuk memelihara hasil pembangunan desa dapat terlaksana, sehingga penulis menyarankan pada PPK agar dalam perannya dalam melakukan pembinaan harus lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat dapat lebih maju dan sejahtera.



PENDAHULUAN

Keluarga menjadi suatu kelompok yang menjadi bagian dalam masyarakat. Keluarga terdiri dari kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi menciptakan peranan sosial. Kumpulan dari keluarga akan membentuk suatu lapisan masyarakat dan selanjutnya lapisan-lapisan masyarakat tersebut akan bergabung dalam kelompok besar menjadi suatu bangsa. Baik buruknya suatu bangsa tergantung pada pembinaan anggota keluarga dan generasi akan datang.

Dalam keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, salah satu yang berperan dalam membina keluarga adalah ibu. Sebagai seorang wanita, ibu dituntut juga untuk mempunyai waktu yang lebih lama untuk tinggal dirumah dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian, maka wanita dituntut untuk dapat mengatur kehidupan rumah tangganya, terutama dalam fungsi sebagai pengasuh anak dan pengatur konsumsi makanan dalam satu keluarga. Dalam membina keluarga ini, wanita memerlukan bekal pendidikan dan pengetahuan.

Perkembangan menunjukkan bahwa sesungguhnya wanita mempunyai potensi yang sama besarnya dengan potensi pria, karena itu dapat dikerahkan dalam pembangunan. Secara hukum wanita Indonesia berpeluang sama dengan pria/laki-laki untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di semua bidang kehidupan. Pasal 21 dan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya kesamaan hak dan kewajiban bagi penduduk tanpa membeda-bedakan apakah pria ataupun wanita, dalam bidang-bidang pekerjaan, kesehatan, politik, dan hukum, serta hak perorangan. Wanita, sebagai warga negara maupun sebagai sumber insani bagi pembangunan mempunyai hak, dan kewajiban dan kesempatan yang sama

dengan pria disegala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan. Pemerintah telah melaksanakan pemberdayaan wanita yang hasilnya terlihat dari adanya peningkatan peran dan kedudukan wanita diberbagai bidang kehidupan. Berdasarkan Biro Pemberdayaan Wanita Kementerian Peranan Wanita 2007 peningkatan tersebut masih belum sebagaimana diharapkan, yaitu terwujudnya keadilan dan keselarasan antara wanita dan pria dalam hak dan kesempatan berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan. Guna meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) wanita Indonesia dan mewujudkan kemitrasejajaran antara pria dan wanita dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintah telah membentuk berbagai program dan sarana yang dapat membantu; salah satunya adalah organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di seluruh wilayah Indonesia. Organisasi ini telah diakui oleh masyarakat, bahkan pada tahun 2007 mendapat penghargaan dari beberapa lembaga internasional (WHO, Unicef, Unesco, dan sebagainya) karena melalui 10 program pokoknya PKK telah mampu melibatkan wanita dan pria dalam upaya mewujudkan keluarga yang sejahtera, maju dan mandiri. Selanjutnya dengan adanya reformasi serta paradigma baru dan semangat otonomi daerah, sejak tahun 1999 akronim PKK berubah lagi menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Kata pemberdayaan dipilih karena mengandung pengertian suatu usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peningkatan kualitas wanita melalui program pemberdayaan wanita yang diarahkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada pada diri wanita.

Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan dalam mendukung program-program pemerintah. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolak ukur dan barometer dalam pembangunan dengan program-program pemerintah. PKK menjadi gerakan untuk membantu dan mendukung program-program pemerintah dengan mendata beberapa aspek yang diperlukan seperti data warga, ibu hamil, bayi, dan balita, kelahiran, kematian, sampai kegiatan masyarakat.

Selain itu, PKK diharapkan mampu membebaskan wanita dari belenggu budaya patriarkhi, sehingga memiliki kemandirian. Melalui PKK diharapkan harkat dan martabat wanita sebagai bagian dari keluarga dapat ditingkatkan. Namun, pada kenyataannya PKK belum sepenuhnya mampu merubah kondisi ekonomi keluarga dan wanita, sehingga belum terwujud kesetaraan, kesejahteraan dan keadilan gender. Adanya kesenjangan ini menyebabkan perlunya melakukan penelitian terhadap PKK, khususnya di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

Berdasarkan observasi awal, Di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan bahwa, PKK yang ada saat ini tidak semaju periode sebelumnya. Banyak anggota yang pasif dalam berkontribusi di kelompok PKK ini. Salah satu faktor penyebabnya karena kesibukan mengurus rumah, selain itu masih rendahnya wanita

yang ikut berpartisipasi dalam melaksanakan program PKK khususnya dalam meningkatkan perekonomian keluarga, Sistem rekrutmen kurang mempengaruhi minat ibu rumah tangga untuk ikut PKK, selain itu juga sosialisasi PKK yang masih kurang dilaksanakan di desa tersebut, sehingga dari permasalahan ini penulis tertarik untuk mengkaji tentang Peranan PKK Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Perempuan Di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

METODE PENELITIAN

Dasar penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian survey, yaitu mengadakan penyelidikan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan – keterangan secara faktual dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang detail mengenai obyek yang diteliti yaitu analisis peranan PKK terhadap kondisi social ekonomi perempuan di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. Adapun dasar penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran fakta dan objek yang diteliti tentang peranan PKK terhadap kondisi social ekonomi perempuan di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan, tindakan yang dilakukan dalam suatu peristiwa. Peranan juga merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang terutama dalam aspek pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga pada masyarakat di Desa. Dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut tentunya peranan seorang organisasi kemasyarakatan desa harus bisa menunjukkan atau melakukan beberapa hal yang bisa mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa.

Peran PKK dalam berkoordinasi dengan Pemerintah dan Masyarakat Desa

Koordinasi sangatlah penting artinya dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan desa, sebab koordinasi mempunyai tujuan antara lain, supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam suatu pekerjaan. Begitu juga dengan PKK dalam pemanfaatan sumberdaya masyarakat terutama kaum perempuan di desa tidak bekerja sendiri, disamping itu dibantu oleh perangkat desa juga dibantu dan dilakukan bersama-sama serta unsur masyarakat lainnya. Dalam pelaksanaan koordinasi, apabila terdapat masalah dalam pelaksanaan kegiatan PKK, kepala desa dapat mengetahui dan memberikan jalan keluar serta pemecahannya dalam batas kewenangannya, sehingga tujuan dari kegiatan-kegiatan maupun diskusi atau musyawarah desa dapat dilaksanakan untuk mengatasi kondisi social perempuan di desa. Sedangkan dalam bidang pemerintahan, kepala desa berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, keamanan, ketertiban umum

dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas yang dimaksud. PKK berkewajiban untuk melakukan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Atas yang secara teknik administratif dijalankan oleh aparat-aparat desa dan perangkatnya.

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa koordinasi yang di lakukan oleh pengurus PKK dan pemeritah dan masyarakat desa tetap dilaksanakansetiap 3 bulan untuk mensosialisasikan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan perekonomian masyarakat/kaum perempuan sehingga program PKK terutama dalam pembangunan ekonomi bisa berjalan sesuai harapan bersama masyarakat desa itu.

Peran PKK dalam memberikan Pembinaan .

Pengurus PKK harus berperan aktif dalam membina dan mengarahkanseluruh masyarakatnya terutama kaum Perempuan di tingkat desa, menciptakan kondisi-kondisi dan perangsang-perangsang yang memotivasi masyarakatnya dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat di desa.

Dari hasil wawancara menunjukan bahwa peranan PKK desa dalam hal melakukan pembinaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan pemanfaatan sumberdaya masyarakat dalam peningkatan kondisi social ekonomi perempuan dapat terlaksana, hal ini di buktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan seminar dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan di Baruga Desa Bo'e sehingga pemberdayaan masyarakat desa dapat meningkat secara bertahap.

Peran PKK dalam Peningkatan Partisipasi

Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan seseorang / masyarakat secara sukarela tanpa dipaksa dan keterlibatan secara spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kegiatan – kegiatan di dalam masyarakat. Partisipasi yang dimaksudkan disini adalah kesadaran masyarakat untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi sangat penting dalam berbagai bentuk kegiatan kemasyarakatan termaksud kegiatan PKK dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat khususnya kaum perempuan/Ibu IRT,

Dari hasil wawancara tersebut, menunjukan bahwa peranan PKK desa dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan dalam meningkatkan kondisi ekonomi perempuan belum terlaksana dengan baik, hal ini di buktikan dengan belum dilibatkannya seluruh kaum perempuan/Ibu rumah tangga dalam program PKK dan kegiatan PKK hanya dilaksanakan pada kegiatan lomba-lomba desa saja.

Peran PKK dalam Mengajak Masyarakat Memelihara Hasil Pembangunan

Peranan PKK dalam mengajak masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan tentu sangatlah penting seperti membersihkan dan merawat gedung-gedung pemerintah desa, melakukan penghijauan, memperindah taman desa dan menjaga kelestarian budaya hal ini dapat kita melalui tanggapan responden.

Dari hasil wawancara tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan PKK desa dalam mengajak masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan terutama pelestarian dan peningkatan perekonomian desa

dapat terlaksana ini dikarenakan adanya himbauan secara terus menerus kepada masyarakat agar tetap menjaga pembangunan dan melestarikan alam desa dengan sebaik-baiknya.

Faktor – Faktor yang mempengaruhi peranan PKK Desa Bo'e dalam meningkatkan kondisi social ekonomi perempuan di desa. Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses pemberdayaankesejahteraan masyarakat desa tidak hanya dilakukan oleh PKK desa saja akan tetapi harus ada dukungan dari semua unsur pemerintah dan masyarakat desa, oleh karena itu hal-hal penting yang mempengaruhi peranan PKK terhadap kondisi social ekonomi perempuan adalah **Sosialisasi** : sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat mengenai peranan PKK terhadap kondisi social ekonomi perempuan, dan yang berikut adalah **Kesadaran**: adalah sikap yang lahir dari masyarakatnya itu sendiri, lahir dari kebiasaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan dan terutama dalam peranan PKK terhadap kondisi social ekonomi perempuan di desa.

PENUTUP

Dari pembahasan tentang peranan PKK terhadap kondisi sosial ekonomi perempuan di Desa B'oe kecamatan Lage Kabupaten Poso yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Peranan PKK dalam melakukan koordinasi kepada pemerintah dan masyarakat desa Bo'e dapat berjalan dengan baik melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan 3 bulan sekali tentang pemberdayaan perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga dan masyarakat sehinggapelaksanaan program pembangunan desa juga terwujud.
2. Peranan PKK dalam melakukan pembinaan kepada kaum perempuan /Ibu rumah tangga Desa Bo'e juga dapat terlaksana dengan baik melalui peningkatan ketrampilan dan sumber daya masyarakat terutama Ibu-Ibu di Desa Bo'e dengan dilakukannya pelatihan atau seminar – seminar kewirausahaan, pemanfaatan kekayaan alam dan ketrampilan mayarakat desa juga bejalan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Peranan PKK dalam meningkatkanpartisipasi masyarakatkhususnya kaum perempuan terhadap kondisi social ekonomi Desa Bo'e, belum dapat terlaksana dengan baik hal ini disebabkan kegiatan-kegiatan PKK di desa dilaksanakan hanya pada acara-acara istimewa saja, seperti lomba tingkat desa, kabupaten dan Propinsi, sehingga partisipasi ibu-ibu rumah tangga sangat kurang.
4. Peranan PKK dalam mengajak masyarakat untuk memelihara hasil pembangunan terutama dalam bidang pelestarian budaya, hasil bumi, dan makanan tradisional desa dapat terlaksana ini dikarenakan adanya himbauan secara terus menerus kepada masyarakat agar melestarikan budaya lokal desa dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan factor-faktor yang mempengaruhi peranan PKK desa adalah **Sosialisasi** : sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat mengenai peranan PKK terhadap kondisi social ekonomi perempuan, dan yang

berikut adalah **Kesadaran** : adalah sikap yang lahir dari masyarakatnya itu sendiri, lahir dari kebiasaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan dan terutama dalam peranan PKK terhadap kondisi sosial ekonomi perempuan di desa itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Suryaningrat, 1979, Desa dan Kelurahan, Rineka Cipta, Jakarta
- Blackburn, Susan.2007.” Kongres Perempuan Pertama”. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Eko Sutoyo, 2005, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ester, Boserup.1984.“Peranan Wanita dalam Perkembangan Ekonomi”.Jakarta: Gadjah Mada University Press
- Koentjaraningrat, 1990, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Friedman, John, Pemberdayaan : Politik Alternatif Pemberdayaan Masyarakat. Cambridge: Blackwell, 1992.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1997. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat. Makalah Disampaikan pada Sarasehan DPD Chambers, Robert.Pembangunan Masyarakat. New York: New York University Press, 1995.
- Moleong, L. J. 1992. *Metodologi Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Maftukhah, 2007.Pembinaan Ketahanan Ekonomi Masyarakat, Jakarta
- Kartasasmita, Ginandjar, Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi; Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi Pemangunan Universitas Brawijaya; Malang, 27 Mei 1995.
- Soedarmayanti.2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja.Bandung : Mandar Maju.
- Ridjal, Fauzie.1993. “Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia”. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Soekanto, 2003.Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. PT. Rajawali
- Soedjono, Ir. 1985, Pembinaan Ketahanan Masyarakat Desa, Jakarta
- Sulastri. 1996. Strategi Pemberdayaan Perempuan.Bandung: Humaniora
- Sugiyono, 2002, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung
- Viktor Situmorang dan Jusuf Juhir., (1998:83-86). *Peran dan Fungsi Aparatur Pemerintah*. Jakarta
- Widjaja, HAW., Prof. Drs.,2003, Pemerintahan Desa/Marga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa